



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 774/VI/2013

11/JUNI 2013



DPR Usulkan Subsidi Ditanggung Pemilik Kendaraan

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA JUNI 2013

Minggu keempat bulan Mei sampai kedua bulan Juni ini, kegiatan Dewan ditandai dengan pelaksanaan fungsi anggaran di Badan Anggaran, Komisi VII dan XI, dan komisi-komisi lain dengan pasangan kerjanya. Kegiatan berkaitan fungsi legislasi adalah akan dimulainya pembahasan RUU inisiatif DPR tentang Pertanahan, dan kegiatan muhibah Ketua DPR-RI dalam rangka hubungan bilateral. Berikut rangkumannya:

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

Kegiatan Bidang Anggaran

Dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 Mei 2013, Pemerintah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun 2014. Dalam Rapat Paripurna DPR RI tersebut juga diumumkan masuknya surat Presiden RI No. R-18/Pres/05/2013 tentang Perubahan UU No. 19 Tahun 2012 tentang APBN TA. 2013.

Berkenaan dengan hal tersebut, Badan Anggaran DPR RI telah melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Bank Indonesia pada tanggal 22 Mei 2013 untuk melakukan pembahasan RUU tentang APBN TA.2013. Dalam Rapat Kerja tersebut Pemerintah menyampaikan Pokok-Pokok RUU Perubahan APBN TA. 2013, sekaligus disepakati membentuk 3 (tiga) Panja yaitu Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, Panja Belanja Pemerintah Pusat dan Panja Transfer ke Daerah serta Tim Perumus Draft RUU.

Berikutnya Komisi VII dan Komisi XI dialokasikan waktu melakukan pembahasan asumsi dasar dalam RUU Perubahan APBN TA.2013. Selain membahas asumsi dasar, Komisi XI juga dialokasikan waktu untuk membahas pembiayaan anggaran. Sedangkan Komisi I s.d Komisi XI dialokasikan waktu untuk melakukan pembahasan Perubahan RKA K/L RUU Perubahan APBN TA.2013. Hasil pembahasan asumsi dasar dari Komisi VII dan Komisi XI akan dibahas Badan Anggaran



DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah dan Bank Indonesia pada tanggal 4 Juni 2013.

Untuk pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN TA. 2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014, Badan Anggaran DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah, Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 3 Juni 2013. Dalam Rapat Kerja tersebut Pemerintah menyampaikan RKP Tahun 2014, Kerangka Ekonomi Makro & Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam RAPBN TA.2014. Selain itu juga telah diputuskan membentuk 4 (empat) Panja yaitu: (1) Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN TA. 2014; (2) Panja RKP dan Prioritas Anggaran Tahun 2014; (3) Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN TA. 2014; dan (4) Panja Kebijakan

Transfer ke Daerah RAPBN TA.2014.

Komisi VII dan Komisi XI dialokasikan waktu untuk membahas asumsi dasar RAPBN TA.2014 tanggal 4 – 10 Juni 2013. Komisi I s.d Komisi XI dialokasikan waktu membahas RKA K/L & RKP Tahun 2014 tanggal 4 – 14 Juni 2013. Sedangkan Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN TA. 2014 dan Panja RKP & Prioritas Anggaran Tahun 2014 direncanakan melaksanakan rapat mulai tanggal 18 Juni 2013. Sedangkan Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN TA. 2014 dan Panja Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN TA.2014 direncanakan melak-



sanakan rapat mulai tanggal 25 Juni 2013.

Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Atas usul inisiatif DPR-RI melalui keputusan Rapat Paripurna, DPR-RI telah menetapkan RUU tentang Pertanahan menjadi RUU DPR, untuk segera dibahas bersama pemerintah. Pada rapat konsultasi pengganti Bamus, ditetapkan AKD yang akan menangani pembahasan RUU ini, setelah datang surat dari Presiden bernomor R-19/Pres/05/2013 tertanggal 22 Mei 2013 yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN dan Menteri Keuangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan pembahasan bersama DPR.

Di dalam penjelasan umum atas RUU tentang Pertanahan antara lain menyebutkan, bahwa pengaturan bidang pertanahan oleh UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) meliputi hal-hal yang bersifat pokok, sehingga dengan perjalanan waktu, berbagai hal yang belum diantisipasi perlu dilengkapi sesuai dengan dengan perkembangan di bidang ilmu, teknologi, sosial-ekonomi, dan budaya, untuk dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Disamping itu, satu dasawarsa setelah terbitnya UUPA, kebijakan ekonomi makro yang diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ikut mewarnai pembentukan peraturan perundang-undangan pertanahan sebagai peraturan pelaksanaan UUPA. Berbagai kebijakan yang terbit pada masa itu tidak jarang telah menyimpang dari falsafah dan prinsip-prinsip yang dianut UUPA.

Dampak dari penyimpangan tersebut dapat juga dilihat pada ketidak-konsistenan antara undang undang sumberdaya alam dengan UUPA terkait bidang pertanahan. Akibat lebih lanjut dari ketidak-konsistenan ini antara lain timbulnya berbagai konflik dan sengketa terkait akses untuk memperoleh dan memanfaatkan sumberdaya alam, disamping semakin mundurnya kualitas dan kuantitas sumberdaya alam.

Kondisi tersebut telah mendorong terbitnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IX/MPR/2001 tentang pembaruan Agraria dan pengelolaan Sumber Daya alam yang dalam arah kebijakannya antara lain mengamanatkan untuk mengambil langkah harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang sumberdaya alam.

Berdasarkan hal tersebut, dianggap perlu untuk menyusun UU tentang Pertanahan dalam rangka melengkapi dan menjabarkan pengaturan bidang pertanahan, mempertegas penafsiran, dan menjadi "jembatan antara" untuk meminimalkan ketidaksinkronan antara UUPA dengan peraturan perundang-undangan sumberdaya alam dalam kaitan dengan pertanahan.

Diplomasi Parlemen

Keberangkatan Ketua DPR RI beserta delegasi DPR RI ke Republik Serbia dari tanggal 3 – 9 Juni 2013 merupakan kunjungan resmi balasan (*reciprocal official visit*), dari kunjungan sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ketua Majelis Nasional Republik Serbia, H.E. Nebojša Stefanović, MSEcon dan delegasi Serbia, ke Indonesia, pada tanggal 17 – 20 Maret 2013 yang lalu. Kunjungan muhibah Ketua DPR RI ini dilaksanakan atas undangan dari Majelis Nasional Republik Serbia, yang disampaikan pada saat kunjungan ke Indonesia pada bulan Maret 2013 yang lalu.

Kunjungan muhibah Ketua DPR RI dan delegasi DPR RI bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar parlemen, sebagai wujud implementasi dari penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang kerjasama antar parlemen (DPR RI – Majelis Nasional Republik Serbia), yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 18 Maret 2013 yang lalu. Di samping melakukan dialog dengan Majelis Nasional Republik Serbia, Ketua DPR RI dan Delegasi DPR RI juga akan bertemu dan melaksanakan dialog dengan Perdana Menteri Republik Serbia H.E. Mr. Ivica Dacic, Presiden Republik Serbia H.E. Mr. Tomislav Nikolic, Wakil Perdana Menteri H.E. Mr. Rasim Ljajic, Pimpinan Tertinggi Gereja Orthodox Serbia, dan Pimpinan Masyarakat Islam Serbia Grand Mufti Adem Zilkic.

Kunjungan muhibah DPR RI ini, selain untuk mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua parlemen di berbagai bidang, juga untuk mendorong kerjasama bilateral berbagai bidang pada jenjang yang lebih tinggi dan strategis menuju kemitraan strategis, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya dan kerjasama sektor lainnya, yang lebih luas, terukur, dan ditujukan bagi kepentingan kedua negara. Untuk itu, fokus kerjasama akan bertumpu pada kerjasama ekonomi perdagangan serta investasi, yang akan memainkan peranan penting dan lebih konkret bagi kepentingan kedua negara.

Selain itu, Ketua DPR RI juga akan menyampaikan tentang pentingnya membangun kedamaian dan kerukunan antar umat beragama dalam suatu negara, maupun kaitan hubungannya dengan negara lain (antar bangsa), di mana poin-poin ini selain akan menjadi bahan dialog dengan para petinggi Republik Serbia, juga akan menjadi bahan dialog dengan Pimpinan Tertinggi Gereja Orthodox Republik Serbia dan Pimpinan Masyarakat Islam Serbia. Beberapa poin lain adalah mengenai dukungan DPR RI terhadap kerjasama pertahanan kedua negara, kerjasama beasiswa pendidikan serta kerjasama sektor pariwisata.*

DPR Usulkan Subsidi Ditanggung Pemilik Kendaraan



Ketua DPR RI Marzuki Alie didampingi Tiga Wakil Ketua DPR usai menggelar pertemuan dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menkeu Chatib Basri, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.

Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, sengaja mengundang pemerintah secara informal untuk *sharing* beberapa hal terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, APBN terkait dengan rakyat banyak, sehingga perlu mendapat perhatian.

Hadir dalam pertemuan ini Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Wakil Ketua DPR Sohibul Iman, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, dan Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR serta Kelompok Fraksi (Poksi). Sedangkan dari pihak pemerintah, hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.

Salah satu hal yang mengemuka dalam pertemuan ini adalah soal Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebagian peserta pertemuan mempertanyakan kepastian kenaikan BBM, ataukah mungkin

ada opsi lain dari pemerintah.

“Sebelumnya, Pimpinan DPR sudah berkonsultasi dengan pemerintah terkait dengan BBM. Waktu itu kami mengusulkan ide bagaimana mengatasi konsumsi BBM yang terus meningkat. Berdasarkan pertimbangan bahwa mayoritas yang menggunakan BBM bersubsidi adalah kendaraan, kami berpikir bagaimana jika subsidi langsung ditanggung kendaraannya. Namun, Presiden akan mempertimbangkan usulan ini terlebih dahulu,” ujar Marzuki di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Senin (3/6).

Marzuki menambahkan, cara yang digunakan yaitu dengan menambahkan nilai rupiah ketika kendaraan melakukan pajak. Ia menilai, hal ini tidak berdampak secara langsung. Rakyat kecil tidak keberatan, dan tidak berdampak besar bagi orang yang menggunakan BBM. Jadi, subsidi yang dimakan oleh kendaraan dapat ditutup oleh kenaikan pajak kendaraan.

Hal lain yang turut menjadi perbincangan diantaranya terkait dengan inflasi, pemotongan anggaran di kementerian dan lembaga, dan kompensasi dari kenaikan BBM. (sf)/foto:iwan armanias/parle.

DPR dan Pemerintah Bahas RKP 2014

Badan Anggaran (Banggar) DPR Rbersama dengan Pemerintah mulai membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 pada Senin (3/6). Hal yang dibahas mulai strategi kebijakan belanja negara, kebijakan fiskal, hingga kerangka penyusunan RKP 2014.

Hadir mewakili pemerintah Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, dan Gubernur BI Agus Martowardojo. Rapat Banggar dipimpin Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit, didampingi dua Wakil Ketuanya Tamsil Linrung dan Djoko Udjiyanto.

Agenda rapat selain membahas RKP 2014 juga melakukan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2014 dengan pemerintah. Penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2014, serta pembentukan Panja-panja anggaran juga dilakukan dalam rapat tersebut. Sementara untuk RUU Perubahan APBN 2013 masih dilakukan pembicaraan tingkat I berupa pembahasan asumsi dasar.

Menkeu Chatib Basri dalam paparannya di hadapan rapat Banggar, mengungkapkan strategi kebijakan belanja negara tahun 2014. Dalam strategi itu disebutkan, memberikan stimulasi terhadap perekonomian melalui



Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit, didampingi dua Wakil Ketuanya Tamsil Linrung dan Djoko Udjiyanto saat membahas RKP.

peningkatan alokasi belanja modal untuk infrastruktur. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi. Strategi lainnya adalah meningkatkan kualitas belanja negara melalui langkah-langkah efisiensi.

Di bidang kebijakan fiskal belanja pemerintah pusat disebutkan, penyesuaian gaji pokok PNS dan Anggota TNI/Polri rata-rata sebesar 6 persen dan pensiunan sebesar 4 persen. Sebelumnya, kenaikan gaji pokok PNS dan TNI/Polri adalah 7 persen. Termasuk dalam kebijakan fiskal ini adalah menuntaskan program reformasi birokrasi. Selain itu, kebijakan fiskal juga menerapkan

flat policy pada belanja barang operasional perkantoran dan pengendalian biaya perjalanan dinas.

Sementara itu Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menjelaskan, dalam RKP 2014, pemerintah ingin memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan. Kerangka isu strategis dalam RKP 2014 yang disusun pemerintah berdasarkan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan isu strategis lanjutan. Tahun 2014 ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN II. (mh) foto:ry/parle.

Sekjen DPR Terima Mahasiswa Program Partnership Indonesia-US

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Winantuningtyastiti berharap dengan adanya kunjungan mahasiswa dari luar Indonesia dapat membuat mahasiswa lebih mengenal Indonesia. Diharapkan, jika mahasiswa lebih mengenal Indonesia, mereka tidak mudah diintervensi oleh berita negatif tentang Indonesia.

“Dengan adanya pengenalan ini, ditunjang dengan sikap kritis mahasiswa, diharapkan mereka dapat lebih mengenal Indonesia, dan tidak mu-

dah diintervensi. Mereka berasal dari Amerika, tentu mereka tidak banyak mengenal tentang Indonesia. Diskusi ini tentu akan sangat menarik. Jika ada kekurangan, hal ini menunjukkan dinamika yang bisa menjadi pelajaran di negara masing-masing,” kata Winantuningtyastiti ketika menerima rombongan mahasiswa *Short Course US-Indonesia Partnership Program* (USIPP) 2013, Senin (3/6) di gedung DPR.

Dalam pengantarnya, wanita yang

akrab dipanggil Win ini menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, bukan negara federal atau monarki. Dengan berlandaskan Pancasila, Indonesia membangun sikap saling menghargai, menghormati pluralisme yang ada, religi, serta budaya sebagai kerukunan beragama untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Hal ini agar tercipta Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera, dan selalu berorientasi pada kepentingan rakyat sebagai wujud dari demokrasi.



Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Winantuningtyastiti menerima rombongan mahasiswa Short Course US Indonesia Partnership Program (USIPP)

“Pengenalan kepada mahasiswa ini DPR di dalam sistem pemerintahan, diantaranya seperti bagaimana posisi peran dan fungsinya. Selain itu, dalam

diskusi ini juga akan dikenalkan bagaimana Indonesia,” ujar Win dalam acara bertema “*Religious and Pluralism Democratic Society ini*”.

Win mengapresiasi kunjungan mahasiswa ini karena program tersebut sejalan dengan apa yang sudah dijalankan oleh DPR. Ia menyatakan bahwa DPR sudah memiliki program DPR Goes To Campus, yaitu dengan mendatangi kampus-kampus. Namun ada kalanya mahasiswa yang mengunjungi DPR.

“Kunjungan ini juga sangat baik untuk generasi muda, karena kelak ketika mereka sudah lulus, dan bisa mendekatkan hubungan antar negara. Mereka juga dapat mengetahui bahwa Indonesia sangatlah luas, dan terdiri lebih dari 300 etnis, sehingga tidak mudah membangun sikap saling menghormati itu,” tutup Win mengakhiri wawancara. (sf)/foto:odjie/parle/iv.

Kepala Daerah Banyak Tersangkut Hukum Karena Pemilukada Mahal

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, banyaknya kepala daerah baik Gubernur, bupati/walikota yang tersangkut masalah hukum lantaran proses pemilukadanya yang mahal. Pasalnya mereka harus mengembalikan uang yang didapatkan dari pihak ketiga atau harus menabung lagi untuk maju lagi pada periode kedua. “Ini juga menimbulkan biaya yang makin mahal,” tegas Pramono menjawab Parlemenaria Senin (3/6) di ruang kerjanya menanggapi banyaknya kepala daerah yang tersangkut masalah hukum.

Berdasarkan data yang diungkapkan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan, jumlah kepala daerah yang tersangkut kasus hukum saat menduduki jabatannya semakin meningkat. Sejak pemilu kada langsung diperkenalkan hingga akhir Mei 2013, jumlah kepala daerah atau wakilnya yang terjerat kasus hukum mencapai 293 orang. Kemungkinan akhir tahun ini bisa mencapai 300 orang.

Menurut Djohermansyah, trend jumlah kepala daerah yang terlibat perso-



Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

alan hukum sudah mengkhawatirkan terutama dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan catatan Kemendagri, hingga akhir 2011 atau jumlah elite politik yang terlibat kasus hukum mencapai 173 untuk kurun waktu enam tahun sejak pemilu kada pertama kali digelar.

“Jumlah ini bertambah 62 orang pada

akhir 2012 menjadi 235 orang dan bertambah lagi menjadi 293 hingga akhir Mei 2013 ini,” papar Djohermansyah.

Melihat kondisi tersebut, Pramono Anung menekankan, harus ada perumusan kembali dalam pemilukada ini yang lebih murah. Dulu, tambah politisi PDI Perjuangan ini, dirinya termasuk



menolak atau keberatan dengan wacana agar Gubernur dikembalikan pemilihannya oleh DPRD. Namun lanjutnya, salah satu upaya agar pemilihan Gubernur lebih murah dipilih oleh

DPRD.

Sedangkan untuk pemilihan bupati/walikota, Pramono mengatakan, karena otonominya ada di kabupaten/

kotamadya, maka untuk pemilihan Bupati/Walikota tetap dipilih oleh rakyat melalui pemilukada langsung. (mp)/foto:odjie/parle/iw.

Pemerintah Diminta Tegas Berhentikan Dirut Pelindo II

Anggota Komisi V DPR Rendy Lamadjido mendesak pemerintah tegas untuk memberhentikan Dirut Pelindo II RJ Lino karena lumpuhnya Pelabuhan Tanjung Priok akibat aksi mogok pengusaha swasta penyedia jasa pelabuhan di Tanjung Priok.

“Tanjung Priok itu pintu gerbang Indonesia dari luar negeri, kenapa ini bisa mogok,” tegasnya kepada wartawan di Gedung Nusantara I, Senin, (3/6).

Menurut Rendy, BUMN Pelindo II ini hanya mencari keuntungan sesaat tanpa mempertimbangkan usaha kecil yang beroperasi disana.



Anggota Komisi V DPR Rendy Lamadjido.

Seperti kita ketahui, selain penyedia infrastruktur operasional bongkar muat yang minim, para pengusaha swasta juga mengkritik banyaknya

jalan yang kondisinya rusak. Padahal 70 persen proyek bongkar muat barang nasional ada di Pelabuhan Tanjung Priok.

Selain itu, dimana seharusnya terdapat jalan tiga jalur, namun hanya satu jalur dan berlubang sehingga menyebabkan macet total di wilayah tersebut. Disisi lain, mayoritas pengusaha swasta juga mengkritik mengenai pembentukan 21 anak perusahaan Pelindo yang akan berbisnis dari hulu ke hilir sehingga dianggap mematikan pebisnis swasta di sekitar pelabuhan Tanjung Priok. (si)/foto:iwan armanias/parle.

Pemotongan Anggaran Kementan Dikhawatirkan Ganggu Ketahanan Pangan



Wakil Ketua Komisi IV DPR Ibnu Multazam.

Komisi IV menyetujui rencana pemotongan anggaran Kementerian Pertanian pada RAPBN-P Tahun 2013, namun dikhawatirkan pemotongan tersebut dapat mengganggu karena ada program prioritas yang dipotong.

“DPR akan melakukan pengawasan dengan alokasi anggaran yang ada supaya target swasembada pangan dan surplus 10 juta ton pada tahun 2013 bisa tercapai,” tegas Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Multazam, setelah Raker dengan Menteri Pertanian, di Gedung DPR, (3/5).

Faktor pencapaian swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional tidak hanya anggaran APBN, Ibnu menjelaskan untuk mendorong semangat petani ada faktor harga pasca panen. “harga pasca panen bagus petani akan mempunyai semangat yang tinggi untuk menanam,” katanya.

Ibnu Multazam mengakui ada kekhawatiran jika terganggunya ketahanan pangan maka akan terjadinya impor pangan. “Komisi IV akan melakukan pengawasan penggunaan anggaran dan meminta kepada Pemerintah un-

tuk menciptakan stabilitas harga yang bagus,” tegasnya.

Komisi IV DPR RI menyetujui rencana pemotongan anggaran Kementerian Pertanian pada RAPBN-P Tahun 2013 sebesar Rp1.442.040.485.000 atau 8,07 % dari Pagu Anggaran Tahun 2013 sebesar Rp 17.862.637.961.000, sehingga APBN Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013 menjadi Rp.16.420.597.476.000,

Komisi IV menugaskan kepada Anggota Badan Anggaran Komisi IV untuk memperjuangkan anggaran kompensasi dalam hal terjadi kenaikan Bahan Bakar Minyak yang dialokasikan untuk APBN-P Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2013 dalam rangka mendukung swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. (as) /foto:wy/parle.

RUU KKG Dorong Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) kini memasuki babak baru. Setelah sempat tertunda pada tahun 2012 lalu, pada tahun ini DPR kembali memasukkan RUU tersebut dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2013. Bahkan saat ini rumusan RUU KKG ini masih dalam tahap penyusunan oleh Panja RUU KKG Komisi VIII DPR RI.

“Kami berharap di masa persidangan ke IV ini RUU KKG bisa segera selesai di tingkat Panja Komisi VIII, yang kemudian akan disampaikan ke Badan Legislasi DPR RI,” harap Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziah ketika ditemui wartawan di ruang tamu Pimpinan Komisi VIII, Gedung Nusantara II Selasa (4/6) siang.

Ida mengatakan bahwa perumusan RUU KKG ini sangat penting karena di negara kita tercinta ini masih terdapat ketimpangan dan ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan, sehingga RUU ini diperlukan untuk melindungi dan menjamin hak setiap orang dari perlakuan diskriminatif. Disamping itu sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender demi tercapainya kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkualitas.

Hal tersebut menurut Ida sejalan dengan amanat UUD 1945 yang dalam salah satu pasalnya menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan

diskriminatif atas dasar apapun. Dengan kata lain, perumusan RUU KKG ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam proses pembangunan, karena menurut Ida pembangunan merupakan tanggung jawab bersama, baik laki-laki maupun perempuan.

Jika kemudian ada kekhawatiran bahwa RUU KKG ini menjadi semacam legalisasi pernikahan sesama jenis, menurut Ida hal tersebut tidaklah benar. Karena Kesetaraan dan Keadilan Gender bertujuan mewujudkan kesamaan untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang kehidupan.

Ida juga menjawab kekhawatiran lain dari sekelompok orang yang menolak RUU KKG ini yang seolah menggerakkan semangat feminisme barat, dimana perempuan dipaksa untuk memenuhi atau mengambil bagian ruang publik. Dengan demikian mengabaikan peran perempuan di wilayah domestik. Ida mengatakan hal tersebut tidak lah benar, karena RUU KKG ini hanya memberikan hak yang sama pada perempuan untuk ikut berpartisipasi di semua bidang kehidupan, dalam membangun bangsa dan negara ini.



Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah.

“RUU KKG ini tidak memaksa perempuan untuk meninggalkan tugas dan kewajibannya di wilayah domestik, misalnya menjadi ibu rumah tangga yang memasak di rumah. Tetapi RUU KKG ini sebagai payung hukum untuk menciptakan *mindset* dimana wanita juga memiliki hak yang sama untuk mengembangkan diri dan berkiprah di segala bidang. Jika kemudian ada wanita yang hanya ingin berkiprah di wilayah domestik saja ya silahkan, tetapi paling tidak negara sudah menjamin haknya mereka untuk bisa berpartisipasi membangun bangsa lewat bidang apapun yang mereka inginkan,” jelas Ida Fauziah sambil menambahkan bahwa RUU KKG sejauh ini tidak memasukkan sanksi atau *punishment*. (Ayu) foto:ry/parle.

Kabupaten-Kota Layak Anak (KLA) Jangan Sekedar Komitmen

Komisi VIII DPR minta penciptaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) bukan sekedar komitmen tapi wujud nyata atau konkretnya. Seperti halnya Bandung, sejak tahun 2006 sudah berkomitmen terhadap KLA tapi nyatanya sampai sekarang belum terwujud.

Demikian disampaikan anggota Komisi VIII Ketut Susitawan saat rapat kerja dengan Menteri Negara Pember-

dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA), Selasa (4/6), yang dipimpin Ketua Komisi VIII Ida Fauziah.

Dalam rapat tersebut, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA) menyampaikan sejumlah upaya dan capaian strategis yang telah dihasilkan Kementeriannya, salah satunya adalah penciptaan kabupaten/kota Layak Anak (KLA) yang ditujukan



Anggota Komisi VIII DPR Ketut Sustiawan.

sebagai wadah dalam pemenuhan hak anak.

Dari tahun ke tahun jumlah kabupaten/kota yang berkomitmen untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak ini semakin meningkat. Sebut saja pada tahun 2008, baru terbentuk 15 menuju KLA, tahun 2011 meningkat menjadi 35, dan tahun 2012 meningkat 60.

Dalam hal ini, Ketut Sustiawan mempertanyakan komitmen 60 kabupaten/kota mewujudkan KLA. Sementara Anggota Komisi VIII lainnya, Humaedi menanyakan konsep KLA seperti apa? Karena sepengetahuannya KLA sendiri masih terdengar asing di masyarakat. Dengan kata lain masih harus dilakukan sosialisasi.

Menjawab hal itu, Meneg PP & PA Linda Amalia Sari mengatakan, bahwa perlu waktu minimal 10 tahun untuk bisa benar-benar mewujudkan KLA.

“Setiap tahunnya kami memiliki tim independen yang akan mengevaluasi Kabupaten/Kota yang sudah menyatakan diri berkomitmen terhadap KLA, barulah Kabupaten/Kota itu sudah benar-benar bisa dikatakan KLA,” jelas Linda.

Lebih lanjut Linda menambahkan bahwa KLA itu sendiri sebenarnya konsep yang diketengahkan PBB (UNICEF) yang aslinya bernama *World Life Children*. Pada tahun 2006 Indonesia berkomitmen untuk ikut menciptakan *World Life Children* yang kemudian dinamakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Salah satu wujud nyatanya adalah dengan tidak adanya lagi anak terlantar di pinggir jalan.

“Kemeneq PP & PA memiliki tugas untuk menyusun program, mengevaluasi agar seluruh kebijakan yang ada aman untuk tumbuh kembang anak,” tambah Linda.

Bahkan dikatakan Linda, Indonesia mendapat penghargaan dari UNICEF karena telah mampu menghimpun dan memfasilitasi pihak swasta dengan membentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak. Dimana asosiasi itu harus memiliki strategi atau kebijakan yang aman untuk anak, selain tentunya produk-produk yang dihasilkan juga harus aman untuk anak. Sejauh ini dikatakan Linda sudah 17 perusahaan yang bergabung dalam asosiasi tersebut.

Diharapkan dengan adanya asosiasi tersebut akan semakin mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak. (Ayu) foto:ry/parle.

Banggar DPR Tetapkan Pertumbuhan Ekonomi 6,3 Persen

Setelah melakukan rapat maraton, Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah akhirnya menetapkan angka pertumbuhan ekonomi 6,3% pada Selasa sore (4/6). Sebelumnya rapat sudah digelar sejak Senin (3/6) dan belum menemukan titik temu pada angka pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pemerintah sebelumnya mengusulkan angka pertumbuhan ekonomi pada 6,2%. Sementara Komisi VIII dan Komisi XI mengusulkan 6,2-6,5%. Dalam rapat tersebut, pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur BI. Rapat sendiri dipimpin Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit (F-PG), didampingi



Menteri Keuangan RI Chatib Basri.

dua Wakil Ketua Tamsil Linrung (F-PKS) dan Djoko Udjiyanto (F-PD).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri mengemukakan usulan angka 6,2% dari pemerintah didasarkan pada triwulan I 2013 yang pertumbuhan ekonominya mencapai 6,02%. Lalu pada triwulan II proyeksinya 6%. Dan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi datang dari PNBFP.

Tahun lalu saja pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,2%. Implikasinya pada lapangan kerja. Dengan angka pertumbuhan tersebut angka pengangguran tidak akan meningkat. Namun demikian, pihak pemerintah menyatakan, penciptaan lapangan kerja tidak akan terlalu besar bila pertumbuhan ekonominya mencapai 6,5% seperti yang diusulkan DPR.

Selain membahas pertumbuhan ekonomi dalam asumsi dasar ekonomi makro RAPBN-P 2013, rapat juga membahas indikator lainnya seperti nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika, inflasi, suku bunga, harga minyak (ICP), *lifting* minyak dan *lifting* gas. Untuk

nilai tukar, antara pemerintah dan DPR sama-sama mematok Rp 9.600/dolar. Inflasi usulan DPR berkisar 6,0-7,2%. Usulan pemerintah, inflasi ditetapkan 7,2%.

Sementara itu, antara pemerintah

dan DPR mengusulkan angka yang sama untuk 3 indikator dalam RAPBN-P 2013. Harga minyak jatuh pada angka 108 US\$/barel. *Lifting* minyak 840 ribu barel/hari. Dan *lifting* gas 1240 ribu barel/hari. (mh). foto:ry/parle.

Komisi XI Pertanyakan Efektifitas PMK 78



Anggota Komisi XI DPR Nusrun Wahid.

Anggota Komisi XI DPR Nusrun Wahid mempertanyakan efektivitas dan sasaran dari aturan Peraturan Menteri Keuangan No. 78/2013 (PMK 78) tentang Penetapan Golongan dan Tarif Cukai Hasil Tembakau. Ia menilai peraturan ini mengacu pada Undang-undang (UU) yang salah dan dapat membunuh usaha rokok kecil.

“PMK No. 78 sebetulnya mengacu pada UU yang salah. UU No 39 Tahun 2007 perubahan dari UU No. 11 Tahun 1995 hanya mengatur ketentuan barang kena cukai dengan tarif tertinggi. Tarif tertinggi dikenakan berdasarkan harga

jual pabrikan dan harga jual eceran. Harusnya pemerintah menggunakan UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” tukas Nusrun ketika rapat dengar pendapat dengan jajaran Kementerian Keuangan di Gedung Nusantara I, Senin (3/6) malam.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Bambang Brojonegoro menyatakan, dasar filosofi aturan ini adalah untuk memberikan keadilan bagi produsen rokok kecil yang harus menghadapi persaingan sesama produsen rokok kecil, namun dimodali oleh perusahaan rokok raksasa. Sehingga, PMK ini akan memastikan produsen rokok yang mengaku berskala kecil akan dikenai cukai seperti yang seharusnya.

“Kenyataan ini sudah kita deteksi di lapangan. Jadi yang semestinya membayar layer 1, tapi sekarang membayar dengan tarif layer 2 dan 3, akan membayar dengan semestinya,” jelas Bambang.

Namun, Nusrun tidak sepeham dengan Bambang. Ia melihat di lapangan bahwa kalangan pengusaha rokok dalam negeri menolak aturan ini. Ia kembali meragukan pemetaan yang dilakukan Kemenkeu.

“Kalau BKF di Kemenkeu membuat aturan ini tapi tidak melakukan pemetaan dengan tepat, ini akan membunuh perusahaan rokok besar ataupun kecil. Apakah BKF sudah melakukan mapping dengan benar?,” tegas Nusrun. (sf)/foto:odjie/parle/iw.

Penghematan Anggaran Kemenkop dan UKM 3,5 Persen

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) mendapat pemotongan anggaran dari APBN 2013 sebesar 3,5%. Hasil tersebut dibahas dalam rapat kerja (Raker) Komisi VI dengan Menkop dan UKM Syarif Hasan, Senin malam (3/6). Raker juga

dihadiri pengurus Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima (F-PDIP) yang memimpin rapat, didampingi Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto (F-PG) dan Wakil Ketua Ketua Komisi VI

Benny K Harman (F-PD), menjelaskan, penghematan di Kemenkop dan UKM sebesar Rp 70.710.000.000 dari jumlah semula yang ditentukan sekitar Rp 125.511.600.000.

Dengan demikian, total pagu ang-

garan Kemenkop dan UKM menjadi Rp 1.739.998.862.000.000. Selanjutnya Kemenkop juga mengajukan perubahan anggaran pada RAPBN 2013 sebesar Rp 217.573.000. Total perubahan anggaran Kemenkop 2013 menjadi 1.957.571.862.000. “Ini akan kita mintakan kepada panitia anggaran Komisi VI untuk dibahas dalam Banggar DPR RI. Tentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Aria

Bima saat memimpin rapat.

Sementara itu, anggaran Dekopin untuk APBN-P2013 tidak dilakukan pemotongan. Pagu anggarannya tetap sesuai APBN 2013 sebesar Rp 85 milyar. Namun, Rp 50 milyarnya masih tertahan karena tanda bintangnya belum hilang. Kementerian Keuangan belum mencabut tanda bintang tersebut.



Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima.



Menkop dan UKM Syarif Hasan dan jajaran dalam Raker dengan Komisi VI DPR.

“Anggaran yang Rp 50 milyar belum bisa dicairkan. Belum bisa dicabut tanda bintangnya oleh Kemenkeu, karena masih ada persoalan normatif-prosedural yang harus diselesaikan secara politis. Komisi VI telah meminta Panitia Anggaran Komisi VI untuk membicarakan secara langsung kepada Menkeu dalam rapat Banggar,” ungkap Aria Bima. (mh)/foto:odjie/parle/iw.

Baleg DPR RI Minta Masukan Revolusioner Bagi RUU Advokad

Badan Legislatif DPR RI (Baleg) meminta masukan yang bersifat progresif dan revolusioner bagi RUU Advokad. Hal tersebut disampaikan Anggota Baleg, Ahmad Yani (F-PPP) saat Rapat Dengar Pendapat Umum Baleg dengan Persatuan Advokad Indonesia (PERADIN) dan Himpunan Advokad Muda Indonesia (HAMI) di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Jakarta, Senin (3/6)

“Mohon kepada kawan-kawan Advokad untuk memberikan masukan yang lebih progresif dan revolusioner lagi, termasuk apa hak-hak advokad. Bagaimana advokad bisa minta penanggulangan penahanan dengan jaminan advokad, itu yang revolusioner,” kata Yani.

Yani memberikan apresiasi dan penghargaan kepada PERADIN dan HAMI yang telah menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam rangka memberikan masukan bagi pembahasan RUU Advokad tersebut.

Namun menurutnya apa yang disampaikan tidak berbeda dengan UU Advokad lama, tidak ada hal yang baru dan



Anggota Baleg DPR Ahmad Yani.

fundamental. Sementara RUU Advokad usulan Baleg sendiri menurutnya lebih dari yang diinginkan PERADIN dan HAMI.

“Kalau kita *lips service* saja, RUU Advokad ini tidak mungkin jadi. Kami serius betul ingin melakukan perubahan terhadap RUU Advokad, karena kita melihat fakta yang ada di lapangan,” tegas Yani.

Dijelaskan Yani, bahwa RUU Advokad ini merupakan RUU Usul Inisiatif DPR. Dimana Baleg ingin advokad diberikan kewenangan dan kewibawaan betul dalam UU Advokad. Yani menyatakan, bahwa

kritik menjadi menu DPR sehari-hari.

“Yang kami inginkan dari RUU Advokad yang sedang dibuat itu adalah perubahan yang cukup fundamental dan ingin memberikan hak betul dan imunitas yang kuat kepada advokad dalam rangka praktek advokad itu sendiri,” tambahnya.

Dijelaskan Anggota Komisi III DPR RI ini, bahwa Baleg

sudah keliling ke seluruh Indonesia, dan Baleg sudah menangkap aspirasi yang dikemukakan oleh para advokad seluruh Indonesia. Dimana pada akhirnya advokad di seluruh Indonesia ingin melakukan perubahan terhadap UU Advokad ini. Hanya beberapa organisasi advokad saja dimana elitnya saja yang tidak mau melakukan perubahan-perubahan. Dan Baleg juga sudah melakukan studi banding kunjungan ke beberapa negara.

“Oleh karena itu, DPR dalam hal ini Baleg akan jalan terus. Kalau ada yang lebih progresif revolusioner perubahannya, sampaikan. Kalau ini hanya

normatif saja perubahannya. Karena kita ingin betul melindungi hak-hak advokad dan hak-hak organisasi advokad itu sendiri,” paparnya.

“Semangat yang kita inginkan, semangat prinsip *multi bar* itu menjadi kenyataan tapi tidak hanya dalam organisasinya, tetapi kewenangan dan kedaulatan advokad jauh lebih tinggi yang kita inginkan,” imbuh Yani.

Nanti malam pun, kata Yani, Baleg masih akan melakukan rapat panja RUU Advokad. “Dan percayalah dalam waktu dekat ini RUU Advokad akan disahkan,” kata Yani.

Namun menurutnya, kita harus tahu bahwa mekanisme yang ada di DPR bukan tentang benar atau salah, ide sebagus apapun akhirnya dihitung dengan suara. Ini juga jadi problem, tapi kata Yani, Baleg tidak gentar, Baleg tetap semangat dan tidak ada satu pun fraksi yang tidak ingin melakukan perubahan-perubahan.

Sebelumnya, PERADIN saat menyampaikannya merasa pesimis bahwa masukan RUU Advokad yang disampaikan tidak akan diperhatikan Baleg dan hanya sekedar *lips service* saja. (sc)/foto:iwan armanias/parle.

DPR Setujui Musi Rawas Utara Menjadi Kabupaten

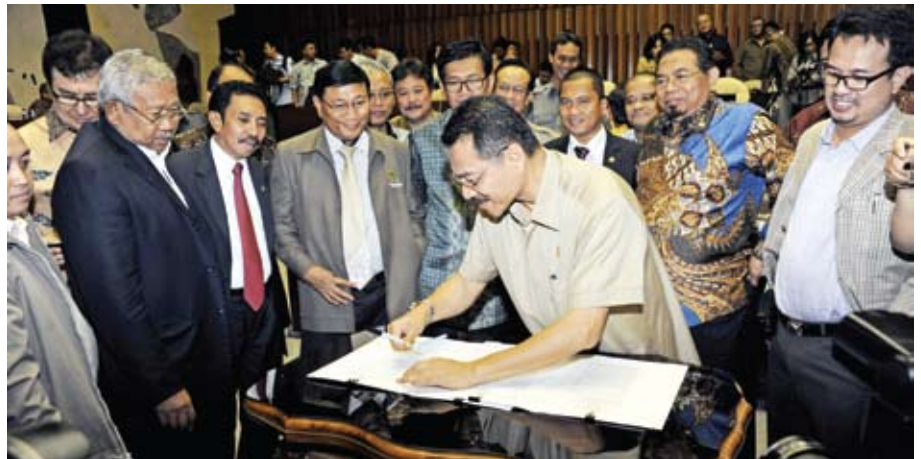
Komisi II DPR bersama Pemerintah dan Komite I DPD RI akhirnya menyetujui dan menyepakati pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara dan selanjutnya akan dibawa ke dalam Rapat Paripurna mendatang untuk disahkan menjadi UU.

“Apakah Rancangan Undang-undang Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan dapat disetujui,” tanya Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar saat Raker dengan Mendagri Gamawan Fauzi dan Komite I DPD RI, di Jakarta, Selasa (4/6).

“Setuju....” jawab seluruh anggota Komisi II DPR dan palu pun di ketuk.

Selanjutnya, tambah Agun, Rapat Kerja Komisi II DPR juga memutuskan RUU tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Prov. Sumatera Selatan yang telah sah menjadi *Draft* RUU akan dibawa pada pembicaraan Tingkat II di sidang Paripurna untuk pengesahannya menjadi UU.

“Untuk itu kami telah merencanakan sesuai dengan penjadwalan Sidang Paripurna pada tanggal 11 atau 18 Juni 2013, kami tetap akan mengupayakan untuk secepatnya dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013, namun tetap kami akan menempuh untuk rapat Badan Musyawarah (Bamus) terlebih dahulu,” jelas Agun.



Mendagri Gamawan Fauzi disaksikan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR menandatangani naskah pemekaran Musi Rawas Utara menjadi Kabupaten.

Setelah itu, pimpinan rapat meminta perwakilan dari fraksi-fraksi yang ada di Komisi II DPR, Pemerintah dan Komite I DPD RI untuk menandatangani *draft* final RUU tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam laporannya, Ketua Panja RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Abdul Hakam Naja menjelaskan, proses pembahasan terhadap RUU ini telah dilakukan pada tanggal 27 Mei 2013 dengan menghadirkan Komite I DPD RI, Pemerintah Prov. Sumsel, Prov. Jambi, Pemerintah Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Sarolangun, serta Badan Informasi Geospasial (BIG).

“Panja mengklarifikasi kembali terhadap penyelesaian permasalahan batas wilayah antara calon Kab. Musi Rawas Utara dengan Kab. Musi Banyuasin, adapun yang diklarifikasi Panja Komisi II DPR dan Pemerintah terhadap 4 (empat) segmen yang bermasalah, yakni Segmen P7 s.d P10 (Suban IV), Segmen P1 s.d P7, Desa Rukun Rahayu dan Desa mekar Jaya Kecamatan Sungai Keruh dan Desa Tebing Tinggi Kec. Nibung Kab. Musi Rawas dengan Desa Sako Suban Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin pada segmen Dusun IV Transos,” jelasnya.

Sedangkan, tambah Hakam Naja, terhadap permasalahan batas yang terkait dengan proses penerbitan Peta Batas Wilayah Prov. Jambi dengan



Prov. Sumsel, khusus sub segmen batas antara Kab. Sarolangun Prov. Jambi dengan Kab. Musi Rawas Prov. Sumsel sudah diselesaikan.

“Namun Gubernur Jambi menyampaikan bahwa seyogyanya tanda tangan para pejabat yang berwenang menandatangani Peta Batas Wilayah bagi semua daerah yang berbatasan adalah tanda tangan asli yang langsung dibubuhi diatas Peta Batas wilayah yang telah disepakati dimaksud oleh masing-masing pejabat yang bersangkutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada rapat Panja tersebut, pemerintah Prov. Sumsel menyampaikan hasil pertemuan pada tanggal 9 April 2013 dalam rangka penyelesaian batas wilayah antara

Kabupaten Musi Rawas dan Kab. Musi Banyuasin dengan beberapa kesimpulan.

Pertama, Segmen P7 s.d P10 (Suban IV) disepakati sesuai Berita Acara rapat tanggal 14 Januari 2013 dimana Sumur Gas Suban IV masuk wilayah Kab. Musi Banyuasin, Kedua, Segmen P1 s.d P7 disepakati mempedomani Berita Acara Kesepakatan Pelacakan Batas Daerah antara Kab. Musi Rawas dengan Kab. Musi Banyuasin tanggal 10 November 2009, Ketiga, Desa Rukun Rahayu seluas kurang lebih 10.000 Ha dan Desa Mekar Jaya seluas kurang lebih 7.000 Ha yang penduduknya berasal dari transmigrasi Gunung Galunggung Tahun 1989 karena pembinaannya telah dilakukan oleh Pemerintah Kab. Musi Banyuasin maka diserahkan kepada

Kab. Musi Banyuasin, dan Ke empat, Dusun V Transos Desa tebing Tinggi kecamatan Nibung seluas kurang lebih 1.900 Ha karena pembinaannya telah dilakukan oleh pemerintah Kab. Musi Rawas maka diserahkan kepada Kab. Musi Rawas.

“Dari uraian tersebut, karena pada segmen-segmen yang bermasalah antara Kab. Musi Rawas dan Kab. Musi Banyuasin telah dilakukan kesepakatan masing-masing pada tanggal 14 Januari 2013 dan 9 April 2013 yang difasilitasi Gubernur Sumsel maka persoalan batas antara Kab. Musi Rawas dengan Kab. Musi Banyuasin telah selesai,” terang politisi PAN ini. (nt)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi X Minta Kajian Mendalam Terkait Minat Baca



Anggota Komisi X DPR Irsal Yunus.

Anggota Komisi X Irsal Yunus meminta jajaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) untuk melakukan kajian mendalam terkait dengan minat baca di masyarakat. Ia melihat, anggaran yang dimiliki oleh PNRI hanya terfokus pada sarana dan prasarana.

“Bagaimana jika dibuat kajian mendalam terkait minat baca? Yang saya maksud, selama ini anggaran PNRI yang mencapai Rp. 400 miliar itu hanya untuk membangun sarana dan prasarana saja. Sedangkan untuk program minat baca, hanya disiapkan anggaran sebesar Rp. 1 miliar saja. Kami menginginkan kajian yang komprehensif tentang minat baca ini,” pinta Irsal ketika rapat dengar pendapat dengan

Kepala PNRI Sri Sularsih, di Gedung Nusantara I, Selasa (04/6).

Selain itu, politisi PDI-P ini juga meminta penggolongan dalam pengkajian minat baca ini. Misalnya kajian minat baca setingkat PAUD, SD, SMP dan seterusnya. Menurutnya, ini dapat dibagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing tingkatan.

“Disinilah PNRI untuk menjadi otodidak. Kalau masuk sekolah kan ada kewajiban pendidikan selama 9 tahun, ada Undang-undangnya. Sedangkan di PNRI tidak ada UU yang mengatur soal gemar membaca, namun memiliki tugas meningkatkan minat dan gemar membaca. Saya juga mengusulkan supaya mengkoreksi anggaran yang diajukan, sehingga ada pengkajian tentang minat baca ini,” ujar Irsal.

Sebagai informasi, pagu anggaran PNRI di tahun 2013 sebesar Rp 422 miliar, sedangkan di tahun 2014 sebesar Rp 433 miliar. Pagu indikatif PNRI di 2014 naik sebesar Rp 10 miliar atau 2,59% dibanding 2014.

Setujui Usulan Tambahan Anggaran

Komisi X menyetujui usulan tambahan anggaran inisiatif yang diajukan oleh PNRI dalam RAPBN TA 2014 sebesar Rp 291 miliar, di luar pagu indikatif tahun

2014 sebesar Rp 433 miliar. Penambahan anggaran inisiatif ini dimaksudkan untuk mendukung program prioritas yang dicanangkan PNRI.

Direncanakan, tambahan anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan fasilitas layanan Perpustakaan Nasional di Jakarta, pembangunan perpustakaan elektronik, bantuan pengembangan perpustakaan umum, pendidikan dan pelatihan perpustakaan, tunjangan kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi, serta pengembangan ruang layanan Perpustakaan Proklamator Bung Karno.

Terkait dengan usulan penambahan anggaran ini, Anggota Komisi X Popong Otje Djundjunan mengingatkan agar tambahan anggaran ini dapat dialokasikan relevan untuk mengatasi kendala yang ada. Selain itu, anggaran dapat dapat diutamakan untuk program prioritas.

“Arah kebijakan dalam paparan tadi adalah untuk meningkatkan gemar membaca. Namun, saya belum menemukan relevansi antara program tambahan anggaran dengan arah kebijakan. Sehingga saya berharap tambahan anggaran tadi dapat digunakan secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan minat membaca,” pungkas Popong. (sf) foto:od/parle.

6 Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Mengadu ke Komisi III

Komisi III DPR RI menerima pengaduan 6 Ikatan Alumni perguruan tinggi yaitu UI, ITB, IPB, ITS, Trisaksi dan UPN Veteran Yogyakarta. Mereka melaporkan kejanggalan pengungkapan kasus *bioremediasi* Chevron yang telah mengkriminalisasi anak bangsa, yang memiliki keahlian di bidangnya.

“Sedari awal penyelidikan, penyidikan hingga persidangan kasus ini penuh kejanggalan dan keganjilan. Bioremediasi sebagai opsi mitigasi dampak lingkungan dari cemaran limbah minyak bumi adalah ranah ilmiah, didasari kontrak antar-perusahaan swasta yang adalah ranah perdata, oleh Kejaksaan Agung dipaksa digusur ke ranah hukum pidana,” kata Rudi Johannes dari UI dalam RDPU di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/13).

Ia menambahkan fakta persidangan menunjukkan dakwaan JPU tidak

mendasar. Majelis hakim juga telah mengabaikan keterangan saksi meringkankan dari Kemeneg LH, ESDM dan SKK Migas. Dari 7 rekan mereka yang berperkara di pengadilan, 2 orang telah dinyatakan bersalah.

“Kejanggalan dan keganjilan proses hukum yang dialami oleh rekan-rekan kami dikonfirmasi oleh temuan Komnas HAM, telah terjadi 11 variabel kejanggalan dan pelanggaran atas 4 komponen HAM,” tegasnya. Aliansi 7 alumni berharap Komisi III dapat memanggil Kejaksaan Agung dan mempertanggungjawabkan perlakuan sewenang-wenang terhadap rekan-rekan mereka.

Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edi menyebut kesenjangan pemahaman antara penegak hukum dengan perkembangan keilmuan telah membuat kasus ini mendapat sorotan. “Bioremediasi inikan ilmu yang belum



Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edi.

lama, jadi aparat penegak hukum belum paham betul, kalau banyak kejanggalan di kasus ini kelihatan aparat hukum kita lemah,” paparnya.

Politisi FPAN ini mengusulkan agar Komisi III melakukan gelar perkara untuk memahami permasalahan dengan melibatkan Kejaksaan Agung, Komnas HAM dan mitra kerja terkait lainnya. (iky) foto:ry/parle.

Pendidikan Kedokteran Perlu Dipayungi UU

Beban biaya pendidikan kedokteran mendorong DPR untuk mengendalikannya dalam bentuk undang-undang. Ke depan, tak ada lagi hambatan bagi masyarakat untuk menjadi dokter yang menimba ilmu di pendidikan kedokteran.

“DPR akan terus membahas RUU Pendidikan Kedokteran yang sempat terhenti pada periode DPR tahun 2008,” kata anggota Komisi X DPR RI, Jefirstson R. Riwu Kore dalam Forum Legislasi di Pers Room gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/6).

Forum itu juga menghadirkan pembicara Wakil Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Ilham Oetama Marsis dan pemerhati pendidikan, Dharmayuwati Pane.

Jefirstson R Riwu Kore menegaskan kalau RUU Pendidikan Kedokteran disahkan, maka nanti tidak ada lagi keluhan masyarakat tentang biaya pendidikan kedokteran yang mahal.

Lebih lanjut, katanya, RUU Pendidikan Kedokteran akan



Anggota Komisi X DPR RI, Jefirstson R. Riwu Kore (tengah) didampingi Ilham Oetama Marsis dan Dharmayuwati Pane.

bersifat khusus dalam UU sistem pendidikan nasional dan pendidikan tinggi. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan kedokteran tetap berlaku, selama tidak bertabrakan dengan UU yang sudah ada.

“Selama tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan UU baru berdasarkan UU Pendidikan Kedokteran jika nanti disahkan,” ujar Jefirstson.

Ilham meminta agar RUU ini memuat sistem pendidikan dan pembiayaannya sampai ke tingkat masyarakat terpencil. Ia menyontohkan responsif pemerintah Muangthai dan Vietnam. Pemerintahnya sangat serius terhadap program pendidikan kedokteran dan kesehatan masyarakat, maka dalam waktu singkat langkah itu bisa mengurangi angka kematian penduduk secara signifikan.

“Jadi, kalau pemerintah mengelola dengan baik, melakukan sinkronisasi dengan UU terkait, pembiayaan, dan distribusi dokter ke seluruh Indonesia, maka tak akan terjadi karut-marut,” ujar dia.

Dharmayuwati menyontohkan negara Jerman, yang serius memperhatikan kesehatan dan pendidikan kedokteran rakyatnya. Jerman mengalokasikan anggaran sebesar 20

persen untuk pendidikan. Sementara untuk bidang kesehatan, Jerman mengalokasikan 15 persen dari APBN.

Bisa digambarkan, rumah sakit pemerintah di Jerman, Muangthai dan Vietnam lebih baik pelayanannya dibandingkan rumah sakit swasta. Bukan sebaliknya, seperti terjadi di Indonesia. Pelayanan dan fasilitas rumah sakit swasta jauh lebih baik dibandingkan rumah sakit pemerintah.

Dharmayuwati mendesak pemerintah dan DPR untuk lebih mengakomodir masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik di rumah sakit pemerintah. “Jadi, pemerintah dan DPR harus mengakomodir aspirasi rakyat karena rakyatlah yang merasakan,” kata dia. (as) foto:od/parle.

RUU Pembantu Rumah Tangga Beri Perlindungan Menyeluruh

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dibuat bukan hanya untuk melindungi pekerja rumah tangga, tetapi juga untuk melindungi pemberi kerja (majikan) maupun penyedia jasa pekerja rumah tangga.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Irgan Chairul Mahfiz, mewakili Komisi IX sebagai pengusul RUU PPRT saat memberikan keterangan dalam rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg), dipimpin Ketua Baleg, Ignatus Mulyono, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/6)

“Jadi RUU ini tidak semata-mata untuk pekerja rumah tangga, tapi juga untuk melindungi semua. Baik itu pekerja rumah tangga, pemberi pekerjaan maupun penyedia jasanya,” kata Irgan.

RUU ini juga menurut Irgan, tidak bias gender. Karena disitu juga mengatur supir, penjaga taman yang juga bukan perempuan. Walaupun total perempuan banyak, katakanlah yang menjadi pekerja rumah tangga.

“Saya kira ini pengaturan yang lebih khusus agar mungkin ada pola kerjasama selama ini yang masih belum tertutupi nilai kekerabatan yang sudah kita bangun selama ini,” imbuh politisi



Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz.

dari Partai Persatuan Pembangunan.

RUU ini, lambat laun akan membangun kesadaran kita untuk bisa berlaku secara formal memperlakukan pekerja rumah tangga kita. Bisa jadi orang-orang yang selama ini kita pakai juga baik, namun mereka tidak terstandarisasi.

“Apa yang berlangsung, misalnya perlakuan kepada pekerja rumah tangga selama ini baik tapi bisa jadi orang lain tidak memperlakukannya dengan baik. Bahkan misalnya katakanlah seperti buruh panci di Tangerang atau yang lain-lainnya. Ini yang harus kita lakukan,” jelasnya.

Dijelaskan Irgan, banyak hal yang selama ini yang tidak kita sadari, misalnya, mungkin dia merasa bekerja baik, tapi belum bisa menjadi ukuran umum. Banyak juga multi pekerjaan yang rangkap dilakukan, dan ini kita tidak sadar memperlakukannya tidak baik. Dan tidak menyediakan upahnya dengan baik.

“Upah disini juga tidak ada ketentuan upah, dan tidak juga harus dengan UMR. Karena kami paham betul, ini kan kesepakatan. Tidak harus berlaku sesuai ketentuan sebagaimana UU,” papar Anggota Dewan dari Dapil Tangerang.

“Jadi yakinlah bahwa RUU ini bukan untuk menggeser nilai-nilai harmoni yang sudah terbangun sebaik yang kita pahami saat ini,” tukasnya.

Irgan menambahkan RUU Ini adalah untuk mengisi ruang yang selama ini mungkin merugikan atau katakanlah ada kerjasama atau kesepakatan yang tidak sama-sama baik. Tidak hanya dialami pekerja rumah tangga, tapi juga oleh pemberi kerja dan penyedia jasa.

Didalam RUU ini juga diatur bagaimana pemerintah daerah harus memberikan pelatihan dan mengeluarkan sertifikasi. (sc) foto:od/parle.

Pimpinan DPR Kukuhkan Ledia Hanifa

Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah dan Wakil Ketua Komisi VIII, Sayed Fuad Zakaria Rabu (5/6) mengukuhkan Pimpinan Komisi VIII yang baru, Ledia Hanifa Amaliah. Ledia menggantikan seniorinya dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini yang pindah ke Komisi II.

“Sesuai Pasal 52 ayat 2 tentang Tata Tertib DPR RI dimana penggantian Pimpinan Komisi ditetapkan oleh Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan, maka melalui surat dari Pimpinan Fraksi PKS No.002/Pimp/18/2013 tanggal 21 Mei 2013 dengan ini saya kukuhkan Ledia Hanifa sebagai Pimpinan Komisi VIII,” kata Taufik yang disusul dengan upacara simbolis penyerahan palu sidang tanda beralihnya pimpinan Komisi ke Ledia.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziyah dalam sambutannya mengatakan, Komisi VIII salah satunya bermitra dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan, semoga dengan hadirnya Ledia sebagai salah satu Pimpinan Komisi VIII menjadi bukti nyata akan kesetaraan



Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan menyerahkan palu pimpinan kepada Ledia Hanifa.

antara pria dan wanita.

“Semoga ini menjadi sebuah langkah yang baik dimana Pimpinan Komisi VIII mendapat komposisi yangimbang dari segi gender,” ujar Ida Fauziyah.

Sementara itu Ledia Hanifa, menga-

takan, bahwa tidak ada kata lain selain ucapan syukur Alhamdulillah karena sudah diberi kepercayaan mengemban amanat yang tidaklah mudah.

“Ini bagian dari amanah yang harus dijalankan, artinya bukan sebuah hal mudah yang harus dijalankan, melainkan bagian dari upaya kita untuk terus memperbaiki dan menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa membantu mendorong DPR RI secara keseluruhan untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu tugas-tugas juga bisa dijalankan dengan baik, termasuk kerjasama dengan teman-teman di Komisi VIII lainnya, maupun dengan para mitra kerja Komisi VIII,” ujar Ledia.

Ledia menyadari masih banyak “PR” yang harus dijalankan sebagai pemegang “tongkat estafet” kepemimpinan sebelumnya. Salah satunya adalah menyelesaikan RUU JPH (Jaminan Produk Halal) yang diketahui penyusunannya sudah cukup lama. Ia berharap dalam masa sidang ke IV RUU JPH dapat segera diselesaikan. (Ayu) foto:iw/parle.

Penanganan Kasus Bank Century Belum ada Perkembangan Signifikan

Tim Pengawas (Timwas) Kasus Bank Century DPR belum melihat perkembangan yang signifikan sementara dokumen dan data telah diserahkan. Demikian salah satu kesimpulan rapat Timwas Century DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman dengan KPK di Gedung DPR, Senayan, Rabu (5/6).

Kesimpulan itu diambil setelah sejumlah anggota Timwas DPR merasa kecewa dengan penjelasan yang disampaikan Ketua KPK Abraham Samad. Pimpinan KPK ini menjelaskan bahwa kegiatan penyidik telah melakukan



Wakil Ketua DPR Sohibul Iman berjabat tangan dengan Ketua KPK Abraham Samad didampingi anggota Timwas Century Didi Irawadi dan Bambang Soesatyo.

pemeriksaan saksi sampai dengan awal Juni 2013 sebanyak 31 saksi dari BI, Kemenku, KSSK, LPS dan pihak lain yang terkait. KPK juga akan terus melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait.

Selanjutnya, kata Abraham Samad yang didampingi Wakil Ketua KPK Bambang Wijojanto dan Zulkarnain serta Satgas

Kasus Century KPK, akan melakukan pendalaman dokumen hasil penyelidikan, penyidikan dan dokumen lain yang relevan. Selain itu penyitaan dokumen atau barang bukti yang

relevan serta diskusi dengan para ahli hukum pidana dan perbankan juga pemeriksaan tersangka.

Dalam kesempatan ini KPK juga menjelaskan perkembangan terhadap pemeriksaan kesehatan Siti C. Fadriah (SJF). Kesimpulannya, saat ini tidak kompeten untuk menjalani pemeriksaan dalam rangka penyidikan hukum karena kesehatan fisik dan mentalnya. Karena itu KPK belum bisa mengeluarkan sprindik atas nama SCF. “Demikianlah perkembangan penanganan kasus Century dengan tersangka BM dan kawan-kawan,” kata Abraham Samad.

Rapat Timwas dengan KPK kali ini berlangsung setelah diundang DPR yang ketiga kalinya, dua kali undangan sebelumnya KPK tidak hadir. Kehadiran KPK diharapkan akan menguak lebih dalam perkembangan penanganan kasus Bank Century termasuk hasil tim penyidik menemui Sri Mulyani di Amerika Serikat.

Sejumlah anggota Timwas mempertanyakan lambannya penanganan kasus Century dan jawaban yang disampaikan tidak ada hal-hal yang baru, padahal Ketua KPK telah menyatakan bahwa keterangan Sri Mulyani bisa membongkar kasus Century. “Saya kecewa, penjelasan KPK tidak ada

perkembangan yang signifikan. Pernyataan KPK hanya memberi angin surga,” tandas Sidarto Danusubroto dari Fraksi PDIP.

Rekannya juga menyampaikan kekecewaan yang sama, bahwa kasus Century merupakan kasus paling lama dan paling membuat gaduh. “Kapan KPK segera mengungkap aktor intelektualnya,” kata anggota Timwas Ismed Ahmad Chandra Tirta Wijaya dari Fraksi PAN.

Sedangkan anggota Timwas dari FPKB Nuryasin dan Syarifudidn Sudding dari F Hanura menagih janji Ketua KPK Abraham Samad saat uji kepatutan dan kelayakan akan menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar seperti Century dalam waktu setahun. Namun ternyata hingga sekarang baru ditetapkan seorang tersangka, lalu apa hambatannya.

Kesimpulan lain rapat Timwas dengan KPK, Timwas Century mendorong KPK untuk menelusuri pengembalian aset-aset Bank Century yang diperoleh dalam kaitan kasus korupsi Bank Century sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. (mp) foto:wahyu/parle.

Dukung Kinerja, Setjen DPR Kumpulkan Penghubung Antara DPR dengan Mitra

Untuk mendukung kinerja, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR mengundang seluruh penghubung antara DPR dengan mitra kerja (pemerintah), baik lembaga maupun non lembaga. Diharapkan, dari 120 undangan yang disebar kepada penghubung, dapat tercipta kinerja yang bersinergi antara DPR dengan *counterpart* (mitra kerja).

“Jadi ini untuk pertama kalinya, Setjen DPR mengundang seluruh penghubung lembaga maupun non lembaga di pemerintah untuk silaturahmi. Namun, ada tujuan lainnya, karena penghubung ini memiliki peran yang besar, sehingga diharapkan penghubung mengetahui apa yang menjadi tugas penghubung, maupun apa yang telah diatur di Undang-undang (UU),” jelas Sekjen DPR Winantuningtyastiti di *Operation Room*, Gedung Nusantara, Rabu (05/6).

Wanita yang akrab disapa Win ini menambahkan, selama ini ada sedikit masalah dalam penyelenggaraan rapat-rapat DPR dengan mitra kerjanya. Misalnya jika ada undangan yang mendadak, dan mitra kerja harus meny-



Sekjen DPR Winantuningtyastiti.

apkan bahan rapat, ini yang menjadi tugas penghubung. Sehingga peran penghubung cukup besar dan penting untuk menjadi jembatan antara Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dengan mitra kerja.

“Dan ada beberapa tugas DPR dengan mitra itu diatur dalam UU. Misalnya terkait dengan tenggat waktu penyampaian usulan RAPBN. Maksimal

penyampaian usulan tanggal 20 Mei, sedangkan 20 Mei itu jatuh hari Senin, namun disampaikan oleh pemerintah hari Jumat pada minggu sebelumnya pada jam 11 malam. Ada jeda di Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Senin harus dirapatkan. Penghubung ini harus optimal perannya, sehingga mereka harus memahami aturan yang ada di sini, misalnya UU MD3, tata tertib yang berlaku di DPR, maupun aturan terkait dengan laporan-laporan pemerintah kepada DPR yang memiliki unsur tenggat waktu,” jelas Win di acara bertajuk Sosialisasi Peraturan DPR tentang Pedoman Peliputan Pers di DPR.

Pertemuan ini, tambah Win, juga bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang peran penghubung. Penghubung merupakan jembatan antara lembaga ataupun non lembaga (pemerintah) dengan DPR. Sehingga diharapkan dengan adanya pertemuan ini, penghubung dapat meningkatkan komunikasi dengan Sekretariat AKD maupun dengan Humas DPR.

Dalam sesi dialog, muncul usulan untuk memudahkan koordinasi antara

penghubung dengan AKD, dibuat sebuah *mailing list* ataupun grup di telepon genggam (*Blackberry Messenger*). Sehingga *update* terbaru dapat segera diterima oleh penghubung. Penghubung menilai, jika menggunakan faksimili sudah tidak efektif, karena terkadang terlambat diterima.

Selain itu, ada pertanyaan terkait

dengan rapat yang sifatnya tertutup. Menanggapi hal ini, Wasekjen Achmad Djuned menyatakan bahwa ada informasi dari hasil rapat tertutup yang belum bisa dipublikasikan. Hal ini terkait dengan kode etik yang berlaku di DPR.

“Misalnya, tidak mungkin ketika Parlemen membicarakan masalah keamanan negara ataupun operasional

intelijen, dilakukan secara terbuka, sehingga rapat dilakukan tertutup. Oleh karena itu, di beberapa negara lain, jika ada anggota maupun mitra yang melanggar aturan ini, bisa dikenakan pidana. Namun, di DPR, hal ini hanya melanggar kode etik,” jelas Djuned. (sf) *foto:od/parle.*

Komisi X Dukung Usulan Tambahan Anggaran Kemenpora

Dalam salah satu kesimpulan rapat kerja antara Komisi X dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komisi X mendukung terhadap usulan tambahan anggaran inisiatif baru Kemenpora dalam RAPBN 2014. Sebagai tindak lanjutnya, Komisi X akan membahas lebih lanjut pada rapat berikutnya.

Pagu indikatif RAPBN 2014 Kemenpora sebesar Rp 1,879 triliun. Namun, karena dirasa masih kurang, Menpora Roy Suryo mengusulkan tambahan anggaran inisiatif baru sebesar Rp 547 miliar.



Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto.

“Ini yang sangat kita pentingkan adalah keputusan antara Komisi X tentang pagu indikatif untuk Kemenpora. Namun dari pagu indikatif itu, ternyata dirasa masih kurang, sehingga Menpora mengajukan usulan tambahan anggaran inisiatif sebesar Rp 547 miliar. Namun, terkait dengan usulan itu,

harus terlebih dahulu dibahas lebih lanjut dan mendetail,” ujar Ketua Komisi X Agus Hermanto usai raker di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Rabu (05/6).

Namun, tambah Agus, untuk saat ini yang menjadi konsentrasi adalah pembahasan pagu indikatif tahun anggaran 2014. Karena hasil pembahasan akan segera diserahkan kepada Badan Anggaran, untuk menjadi APBN 2014. Selain itu, Agus juga mengingatkan bahwa tidak semua usulan dapat diterima.

“Sepanjang yang kami ketahui, tidak semuanya dapat diterima. Namun biasanya, disesuaikan dengan anggaran, karena nanti kan ada optimalisasi atau opsi lainnya. Jika ada kenaikan anggaran di Kemenpora, tentunya akan kami utamakan yang menjadi program prioritas Kemenpora,” tambah politisi Demokrat ini.

Terkait dengan apa yang telah dicapai oleh Kemenpora, Agus menilai bahwa program masih perlu digalakkan kembali. Ia merasa belum ada prestasi olahraga yang menjadi unggulan. Termasuk di bidang kepemudaan. Sehingga ia meminta Kemenpora untuk bekerja keras dalam menghasilkan prestasi yang membanggakan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Anggota Komisi X Irsal Yunus. Ia menilai selama ini Kemenpora masih kurang efektif dalam menjalankan program, khususnya tentang pemberdayaan pemuda.

“Selama ini, saya menilai hasil program Kemenpora belum konkrit secara kualitas dan kuantitas. Di olahraga juga belum ada peningkatan yang signifikan, termasuk atlet-atlet baru yang menggantikan seniornya. Program yang dibuat oleh Menpora masih belum kelihatan,” ujar Irsal usai menghadiri rapat.

Namun, terkait dengan permintaan tambahan anggaran, Irsal melihat adanya hubungan yang cukup signifikan dengan program peningkatan pemberdayaan pemuda dan olahraga. Namun, sekali lagi ia mengingatkan Menpora agar membuat program yang lebih mengarah peningkatan pemberdayaan pemuda dalam bentuk



Anggota Komisi X DPR Irsal Yunus.

konkrit, sehingga memiliki kualitas dan kuantitas. Demikian juga dengan peningkatan prestasi dalam bidang olahraga, sehingga menjadi unggulan Indonesia di dunia internasional. (sf) *foto:od/parle.*

Pansus RUU Ormas Himpun Masukan di Kalbar

Panitia Khusus RUU Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini sebagai uji publik dan menghimpun masukan terkait perkembangan pembahasan RUU yang sudah dilakukan bersama pemerintah.

“Kita ingin memperoleh masukan terkait pokok-pokok substansi yang perlu diperbaiki dan disempurnakan dari RUU Ormas hasil pembahasan DPR bersama pemerintah,” kata Ketua Tim Kunker, Rahadi Zakaria di Kantor Gubernur Provinsi Kalbar, Pontianak, Rabu (5/6/13).

Dalam pertemuan tersebut Tim Kunker berdialog dengan jajaran Muspida dan sejumlah ormas. Beberapa pertanyaan mengemuka diantaranya terkait pasal tentang azas, keuangan, keberadaan ormas asing, sengketa

organisasi dan sanksi.

“Kita juga akan berdialog dengan mahasiswa, para pakar yang ada di kampus, khususnya Universitas Tanjung Pura,” lanjut Rahadi yang juga Ketua Panja (Panitia Kerja). Ia menyebut kunker diikuti oleh perwakilan 8 fraksi, sementara FPAN berhalangan.

Sementara itu Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya menyampaikan penghargaan atas dipilihnya Provinsi Kalbar sebagai tempat sosialisasi. “Terima kasih telah memilih Kalbar, disini memang terdapat banyak ormas terutama yang bercirikan budaya. Mereka sangat tepat mengkritisi RUU yang menjadi perhatian banyak pihak di tanah air,” paparnya.

Sejumlah organisasi kemasyarakatan di provinsi yang terkenal dengan sebut-



Ketua Tim Kunker Pansus RUU Ormas Rahadi Zakaria.

an ‘Bumi Khatulistiwa’ ini berpartisipasi dalam pertemuan diantaranya, Majelis Adat Tionghoa, Persatuan Muslim Tionghoa, organisasi masyarakat Madura, Dayak dan Majelis Adat Budaya Melayu. (iky) foto:Iwan Armanias/parle.

Parlemen Siprus Minta Dukungan DPR



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung bertukar cinderamata dengan Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Siprus Averof Neofytou.

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menerima kedatangan delegasi Parlemen Siprus dipimpin Ketua Komisi Luar Negeri Averof Neofytou. Dalam kesempatan itu ia mengemukakan dukungan terhadap negara pulau yang terletak di Laut Tengah bagian timur ini.

“Kita memberi dukungan secara politik untuk penyelesaian Siprus melalui resolusi PBB agar tetap bisa dipertahankan. Bagaimanapun Indonesia menganut politik bebas aktif dan menghargai kedaulatan negara yang ada dan apa yang menjadi posisi pemerintah pada saat ini didukung oleh

parlemen,” kata Pramono dalam pertemuan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/6/13).

Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut Ketua BKSAP Surahman Hidayat. Menurutnya walaupun kedua negara tengah disibukkan dengan masalah politik dan pemilu, kerja sama antar parlemen hendaknya dapat terus ditingkatkan.

“Friendship group ini perlu kita kembangkan dengan kerja sama yang lebih efektif. Walaupun pada tahun ini mulai sibuk tahun politik, tapi visi kami tetap mengembangkan friendship group ini sehingga meng-cover seluruh negara sahabat di dunia. Kami ingin mengembangkan kerja sama yang lebih baik dengan seluruh parlemen di dunia,” paparnya.

Sementara itu Averof Neofytou mengaku tertarik belajar tentang bagaimana Indonesia bangkit dari krisis yang terjadi tahun 1998. Ia menyebut pengalaman tersebut diperlukan untuk bangkit dari krisis ekonomi yang menimpa negaranya, imbas dari krisis yang terjadi di Yunani.

“Krisis seperti yang terjadi tahun 1998 di Indonesia seperti ini juga terjadi pada kami sekarang ini. Kami saat ini mendapat dukungan dari IMF dan berupaya tetap optimis dapat mengatasi masalah ini,” ujarnya. Ia juga mengharapkan dukungan parlemen Indonesia agar konflik dalam negeri yang terjadi setelah berdirinya negara Siprus Utara yang didukung Turki, dapat segera diselesaikan. (iky) foto:wahyu/parle.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Pramono Anung Wibowo menerima kunjungan kehormatan Parlemen Siprus Neofytov Averov dan Messis Christos di Gedung Nusantara III DPR RI. Senin (3/6). Foto: Wahyu/Parle.



Pengukuhan Ledia Hanifa sebagai Pimpinan Komisi VIII DPR oleh Wakil Ketua DPR/Korkesra Taufik Kurniawan didampingi Ketua Komisi VIII Ida Fauziyah dan Sayed Fuad Zakaria dilanjutkan foto bersama Anggota Komisi VIII. Rabu (5/6). Foto: Iwan Armanias/Parle.



Penandatanganan RUU Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan oleh Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar disaksikan Mendagri Gamawan Fauzi dilanjutkan dengan ucapan selamat di Gedung Nusantara. Selasa (4/6) Foto: Iwan Armanias/Parle.